

## Pengaruh Bimbingan Teknis terhadap Kualitas Pelaporan melalui Tata Kelola dan Akuntabilitas Sosial Pemerintah

*The Influence of Technical Guidance on Reporting Quality through Governance and Social Accountability of Government*

Tia Desi Yanti

[tiaibra24@gmail.com](mailto:tiaibra24@gmail.com)

Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

### Info Article

| Submitted: 16 November 2025 | Revised: 5 December 2025 | Accepted: 6 December 2025

How to cite: Muhammad Achlan Fauzi, "Pengaruh Bimbingan Teknis terhadap Kualitas Pelaporan melalui Tata Kelola dan Akuntabilitas Sosial Pemerintah", *Proceeding National Conference Sisi Indonesia II*, 2025, P. 706-720.

### ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Technical Guidance Quality on Government Reporting Quality, with Governance Behavior and Social Accountability as mediating variables in government agencies in Aceh Province. The research employs a quantitative explanatory approach using the Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS–SEM) method. Data were collected through questionnaires distributed to 150 employees involved in the reporting process within government institutions in Aceh, selected using purposive sampling. The results indicate that Technical Guidance Quality has a positive and significant effect on Governance Behavior and Social Accountability, and both directly and indirectly influence Reporting Quality. Furthermore, Governance Behavior and Social Accountability are proven to serve as partial mediating variables that strengthen the relationship between Technical Guidance Quality and Reporting Quality. These findings suggest that improving the quality of technical guidance not only enhances the competence of government officials but also promotes the development of good governance behavior and increases social accountability in public administration. Practically, this study recommends that the Aceh government strengthen needs-based technical guidance programs, enhance public participation in oversight, and uphold the principles of good governance to produce more accurate, transparent, and reliable reports.

**Keyword:** Technical Guidance Quality, Governance Behavior, Social Accountability, Reporting Quality.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kualitas Bimbingan Teknis terhadap Kualitas Pelaporan Pemerintah, dengan Perilaku Tata Kelola dan Akuntabilitas Sosial sebagai variabel mediasi pada instansi pemerintah di Provinsi Aceh. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif eksplanatori dengan metode Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS–SEM). Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 150 pegawai yang terlibat dalam proses pelaporan pada instansi pemerintah di Aceh, dipilih dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Bimbingan Teknis berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perilaku Tata Kelola dan Akuntabilitas Sosial, serta secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap Kualitas Pelaporan. Selain itu, Perilaku Tata Kelola dan Akuntabilitas Sosial terbukti berperan sebagai variabel mediasi parsial yang memperkuat hubungan antara Kualitas Bimbingan Teknis dan Kualitas Pelaporan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan mutu bimtek tidak hanya berdampak pada peningkatan kompetensi aparatur, tetapi juga mendorong pembentukan perilaku tata kelola yang baik dan peningkatan akuntabilitas sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah Aceh memperkuat program bimbingan teknis berbasis kebutuhan, meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan, serta menegakkan prinsip-prinsip good governance untuk menghasilkan laporan yang lebih akurat, transparan, dan andal.

**Kata Kunci:** Kualitas Bimbingan Teknis, Perilaku Tata Kelola, Akuntabilitas Sosial, Kualitas Pelaporan



This work is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



## Pendahuluan

Kualitas pelaporan keuangan pemerintah merupakan salah satu indikator utama keberhasilan reformasi birokrasi dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban administratif, tetapi juga menjadi sarana bagi masyarakat dan lembaga pengawas untuk menilai transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik (Diamond, 2023). Di Indonesia, peningkatan kualitas pelaporan pemerintah telah menjadi fokus utama sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menegaskan bahwa laporan keuangan harus disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), andal, dan bebas dari salah saji material.

Namun demikian, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI, 2024) menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai permasalahan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah, seperti lemahnya sistem pengendalian internal, ketidaksesuaian pencatatan aset, serta terbatasnya kapasitas sumber daya manusia dalam memahami dan menerapkan kebijakan akuntansi terkini. Kondisi ini menyebabkan sejumlah pemerintah daerah, termasuk beberapa kabupaten/kota di Provinsi Aceh, belum sepenuhnya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Laporan BPKP (2024) mengidentifikasi bahwa salah satu penyebab utama persoalan tersebut adalah belum optimalnya pelaksanaan program bimbingan teknis (Bimtek), khususnya Bimtek terkait peningkatan kompetensi penggunaan aplikasi laporan realisasi fisik dan keuangan yang menjadi instrumen penting dalam penatausahaan dan penyajian data pelaporan APBD.

Bimbingan teknis memiliki peran strategis dalam memperkuat kompetensi aparatur pemerintah dalam hal regulasi, penyusunan laporan, dan pengelolaan keuangan daerah. Menurut Muda dan Riantani (2023), efektivitas sebuah Bimtek sangat dipengaruhi oleh kualitas instruktur, relevansi materi, dan keberlanjutan proses pembelajaran. Bimtek yang dilaksanakan hanya sebagai formalitas tanpa analisis kebutuhan pelatihan cenderung tidak menghasilkan peningkatan kinerja maupun perubahan perilaku kerja. Sebaliknya, Bimtek yang berbasis pada *training needs assessment*—termasuk pada penggunaan aplikasi laporan realisasi fisik dan keuangan—mampu meningkatkan akurasi data, memperbaiki proses pencatatan, serta memperkuat akuntabilitas pelaporan.

Di samping aspek teknis, kualitas pelaporan juga sangat dipengaruhi oleh perilaku tata kelola (*governance behavior*) dalam organisasi pemerintah. *Governance behavior* mencerminkan sejauh mana nilai integritas, akuntabilitas, kepatuhan, dan transparansi diinternalisasikan dalam perilaku aparatur (Kim & Lee, 2022). Aparatur yang memiliki perilaku tata kelola yang baik akan konsisten menjalankan prosedur, terbuka dalam penyampaian informasi, serta jujur dalam

pengelolaan sumber daya publik. Hal ini sejalan dengan prinsip Good Governance menurut World Bank (1992), yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi publik.

Selain tata kelola internal, akuntabilitas sosial (*social accountability*) juga berperan besar dalam mendorong kualitas pelaporan pemerintah. Akuntabilitas sosial merupakan mekanisme partisipatif di mana masyarakat memiliki ruang untuk mengawasi, memberikan masukan, serta menuntut keterbukaan informasi publik (Fox, 2015). Seiring meningkatnya akses digital dan transparansi informasi, peran masyarakat, media, dan organisasi sipil semakin signifikan dalam menilai integritas pelaporan keuangan. Ackerman (2023) menemukan bahwa pengawasan publik yang aktif dapat meningkatkan transparansi dan memperkuat komitmen aparatur dalam menyusun laporan yang kredibel.

Dalam konteks Provinsi Aceh, penerapan akuntabilitas sosial dan tata kelola menjadi semakin penting seiring dengan karakteristik otonomi khusus yang memberikan kewenangan fiskal lebih luas. Laporan Kementerian Dalam Negeri (2024) menunjukkan bahwa sejumlah instansi pemerintah di Aceh masih menghadapi kendala dalam ketepatan waktu pelaporan dan penyerapan anggaran. Hal ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas aparatur melalui Bimtek yang relevan dan adaptif khususnya Bimtek peningkatan kompetensi penggunaan aplikasi laporan realisasi fisik dan keuangan untuk mendukung proses pelaporan berbasis teknologi yang akurat dan tepat waktu.

Sejumlah studi empiris juga menguatkan pentingnya kapasitas teknis dan tata kelola dalam meningkatkan kualitas pelaporan. Fang (2023) menemukan bahwa kompetensi digital pegawai publik berpengaruh positif terhadap efisiensi dan keakuratan pelaporan. Chen et al. (2023) menegaskan bahwa perilaku tata kelola yang berintegritas berkontribusi signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sementara Tadesse dan Debela (2024) menunjukkan bahwa budaya organisasi yang mendukung akuntabilitas sosial dapat memperkuat hubungan antara pelatihan teknis dan kinerja pelaporan publik.

Secara teoritis, hubungan antara Kualitas Bimtek, Perilaku Tata Kelola, Akuntabilitas Sosial, dan Kualitas Pelaporan dapat dijelaskan melalui teori Good Governance dan Agency Theory. Dari perspektif agency theory, adanya asimetri informasi antara pemerintah (agen) dan masyarakat (principal) dapat diminimalkan melalui peningkatan kompetensi teknis dan penerapan tata kelola yang baik (Jensen & Meckling, 1976). Sementara itu, teori Good Governance menegaskan bahwa kualitas pelaporan publik merupakan hasil sinergi antara kemampuan teknis aparatur, integritas perilaku organisasi, serta partisipasi masyarakat (OECD, 2022).

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menguji sejauh mana Kualitas Bimbingan Teknis khususnya Bimtek peningkatan kompetensi

penggunaan aplikasi laporan realisasi fisik dan keuangan mempengaruhi Kualitas Pelaporan Pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Perilaku Tata Kelola dan Akuntabilitas Sosial sebagai variabel mediasi. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman tentang mekanisme peningkatan akuntabilitas publik melalui pendekatan pelatihan teknis dan tata kelola. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Aceh, dalam merancang Bimtek yang lebih adaptif, meningkatkan integritas organisasi, serta mendorong partisipasi publik untuk mewujudkan pelaporan yang transparan, andal, dan berintegritas.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori, karena bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel melalui pengujian hipotesis empiris. Pendekatan ini sesuai dengan pernyataan Sugiyono (2022) bahwa penelitian eksplanatori digunakan untuk menguji pengaruh antar variabel yang telah dirumuskan berdasarkan teori.

Metode analisis yang digunakan adalah Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Metode ini dipilih karena dapat menganalisis hubungan kausal yang kompleks antara variabel laten, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta tidak mensyaratkan distribusi data normal (Hair et al., 2021). Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak SmartPLS versi 3.0.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pemerintah daerah di Provinsi Aceh yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan dan kinerja instansi. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dengan kriteria: (1) pegawai yang pernah mengikuti bimbingan teknis terkait pelaporan keuangan, (2) memiliki pengalaman kerja minimal dua tahun, dan (3) berperan langsung dalam penyusunan laporan keuangan instansi. Berdasarkan ketentuan Hair et al. (2021), ukuran sampel minimal ditentukan sebanyak 10 kali jumlah indikator. Dalam penelitian ini terdapat 15 indikator, sehingga diperlukan minimal 150 responden. Jumlah tersebut telah terpenuhi dari hasil pengumpulan data.

Instrumen penelitian berupa kuesioner yang disusun menggunakan skala Likert 5 poin (1 = sangat tidak setuju, 5 = sangat setuju). Kuesioner terdiri atas empat konstruk utama:

1. Kualitas Bimbingan Teknis ( $X_1$ ) – diukur melalui indikator relevansi materi, kompetensi narasumber, metode penyampaian, dan keberlanjutan program (Muda & Riantani, 2023; Kurniawan et al., 2024).
2. Perilaku Tata Kelola ( $M_1$ ) – diukur dari indikator transparansi, integritas, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi (Kim & Lee, 2022).

3. Akuntabilitas Sosial (M<sub>2</sub>) - mencakup partisipasi publik, keterbukaan informasi, dan mekanisme umpan balik masyarakat (Fox, 2015; Ackerman, 2023).
4. Kualitas Pelaporan (Y) - diukur berdasarkan relevansi, keandalan, komparabilitas, dan keterpahaman laporan (Hassan & Harun, 2024).

Data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa dokumen hasil pemeriksaan BPK, laporan keuangan pemerintah daerah, dan hasil evaluasi pelatihan aparatur.

Analisis dilakukan melalui dua tahap utama:

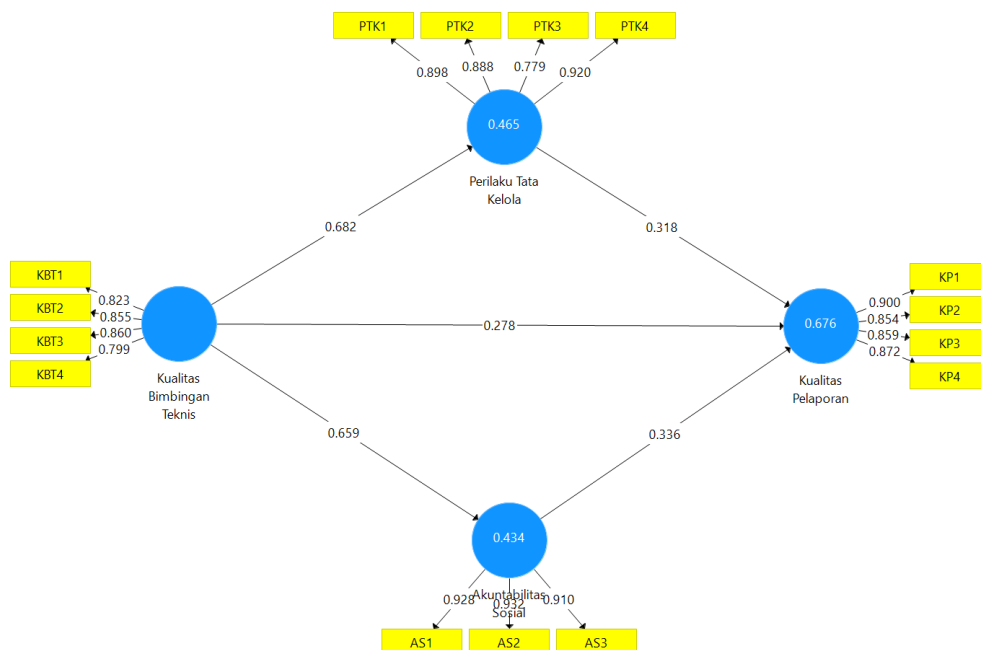
1. Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) - untuk menguji validitas dan reliabilitas indikator berdasarkan nilai loading factor ( $>0,70$ ), AVE ( $>0,50$ ), dan composite reliability ( $>0,70$ ).
2. Evaluasi Model Struktural (Inner Model) - untuk menguji hubungan antar variabel laten dengan melihat nilai R<sup>2</sup>, path coefficient, t-statistics, dan p-value melalui prosedur bootstrapping.

Selain itu, pengujian mediasi dilakukan menggunakan nilai indirect effect dan Variance Accounted For (VAF) untuk menentukan jenis mediasi (penuh atau parsial) sesuai panduan Hair et al. (2021).

## Hasil dan pembahasan

### 1.1 Uji Validitas

Adapun model pengukuran untuk uji validitas dan reabilitas, koefisien determinasi model dan koefisien jalur untuk model persamaan, dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



Sumber: Output SmartPLS 3.0, 2025

### Gambar 1. Tampilan hasil PLS

**Tabel 1. Average Variance Extracted (AVE)**

Variabel	AVE
Akuntabilitas Sosial	0,852
Kualitas Bimbingan Teknis	0,697
Kualitas Pelaporan	0,760
Perilaku Tata Kelola	0,762

Sumber: Output SmartPLS 3.0, 2025

Berdasarkan hasil pengujian model pengukuran pada Gambar 1, seluruh konstruk yaitu memiliki nilai faktor loading di atas 0,6 dan nilai AVE lebih besar dari 0,5 pada semua indikatornya. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing konstruk telah memenuhi syarat *convergent validity* dengan baik.

## 1.2 Uji Reliabilitas

Berikut ini adalah hasil pengujian *composite reliability* dan *cronbach's alpha*:

**Tabel 2. Composite Reliability dan Cronbach's Alpha**

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reability
Akuntabilitas Sosial	0,913	0,945
Kualitas Bimbingan Teknis	0,855	0,902
Kualitas Pelaporan	0,894	0,927
Perilaku Tata Kelola	0,895	0,927

Sumber: Output SmartPLS 3.0, 2025

Suatu konstruk dikatakan reliabel apabila memiliki nilai composite reliability di atas 0,70 dan Cronbach's alpha melebihi 0,60. Berdasarkan hasil output dari SmartPLS, seluruh konstruk dalam penelitian ini memenuhi kedua kriteria tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk yang digunakan memiliki reliabilitas yang baik.

### 1.3 Pengujian Hipotesis

Untuk menilai signifikansi model prediksi dalam pengujian modelstruktural, dapat dilihat dari nilai t-statistic antara variabel independen ke variabel dependen dalam tabel *Path Coefficient* pada output SmartPLS dibawah ini.

**Tabel 3. Path Coefficient**

Pengujian	Original Sample	Standar Deviasi	T-statistics	P-values
Kualitas Bimbingan Teknis - > Kualitas Pelaporan	0,278	0,116	2,389	0,017
Perilaku Tata Kelola -> Kualitas Pelaporan	0,318	0,114	2,795	0,005
Akuntabilitas Sosial -> Kualitas Pelaporan	0,336	0,080	4,184	0,000
Kualitas Bimbingan Teknis - > Perilaku Tata Kelola	0,682	0,057	12,028	0,000
Kualitas Bimbingan Teknis - > Akuntabilitas Sosial	0,659	0,047	14,050	0,000

Sumber: Output SmartPLS 3.0, 2025

### Pengaruh Kualitas Bimbingan Teknis terhadap Perilaku Tata Kelola



Berdasarkan hasil pengujian SmartPLS (lihat Tabel 4), variabel Kualitas Bimbingan Teknis berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perilaku Tata Kelola, dengan nilai path coefficient sebesar 0,682, t-statistics 12,028, dan p-value 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas pelaksanaan bimbingan teknis, semakin tinggi pula tingkat penerapan perilaku tata kelola dalam instansi pemerintahan.

Temuan ini mendukung penelitian Kim dan Lee (2022) serta Fang (2023), yang menyatakan bahwa peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan teknis mampu menumbuhkan budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Bimbingan teknis yang relevan dengan kebutuhan kerja meningkatkan pemahaman aparatur tentang regulasi dan tanggung jawab pelaporan, sehingga mendorong perilaku yang selaras dengan prinsip good governance.

Dalam konteks pemerintahan Aceh, hasil ini menegaskan bahwa program bimtek yang dirancang secara partisipatif dan berbasis kebutuhan nyata berpotensi besar memperkuat budaya kerja yang patuh aturan dan berorientasi pada pelayanan publik yang bersih.

### **Pengaruh Kualitas Bimbingan Teknis terhadap Akuntabilitas Sosial**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Kualitas Bimbingan Teknis juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Sosial, dengan nilai koefisien 0,659, t-statistics 14,050, dan p-value 0,000. Ini berarti semakin baik kualitas bimtek yang diberikan, semakin kuat pula penerapan prinsip akuntabilitas sosial dalam organisasi pemerintahan.

Bimbingan teknis yang efektif tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga memperkuat kesadaran pegawai terhadap tanggung jawab sosial dan transparansi publik (Muda & Riantani, 2023). Menurut Fox (2015), social accountability berakar pada dua hal utama: kemampuan internal organisasi untuk menyampaikan informasi yang dapat dipercaya, dan kesiapan aparatur untuk melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi.

Hasil ini menegaskan bahwa bimtek yang dirancang dengan prinsip keterbukaan dan kolaborasi dapat mendorong aparatur untuk lebih terbuka terhadap umpan balik publik, memperbaiki mekanisme pelaporan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

### **Pengaruh Perilaku Tata Kelola terhadap Kualitas Pelaporan**

Pengujian hubungan antara Perilaku Tata Kelola dan Kualitas Pelaporan menunjukkan nilai path coefficient sebesar 0,278, t-statistics 2,389, dan p-value 0,017, yang berarti berpengaruh positif dan signifikan. Hasil ini mengindikasikan



bahwa perilaku tata kelola yang baik berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah.

Pegawai yang memiliki perilaku tata kelola yang berintegritas akan lebih disiplin dalam pencatatan transaksi, taat terhadap prosedur akuntansi, dan berkomitmen pada transparansi (Chen et al., 2023). Selain itu, penerapan nilai-nilai integritas dan akuntabilitas dalam perilaku individu memperkuat efektivitas sistem pelaporan secara keseluruhan.

Penelitian Hassan dan Harun (2024) juga mendukung temuan ini, dengan menyatakan bahwa governance-oriented behavior merupakan salah satu determinan utama kredibilitas laporan keuangan di sektor publik.

### **Pengaruh Akuntabilitas Sosial terhadap Kualitas Pelaporan**

Hasil pengujian SmartPLS menunjukkan bahwa Akuntabilitas Sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pelaporan, dengan nilai path coefficient 0,318, t-statistics 2,795, dan p-value 0,005. Hasil ini berarti partisipasi publik dan keterbukaan informasi mampu memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Ackerman (2023), mekanisme akuntabilitas sosial menciptakan tekanan positif bagi organisasi publik untuk memperbaiki kinerja pelaporan dan memastikan transparansi dalam penyampaian data. Ketika masyarakat dilibatkan dalam proses evaluasi, aparatur termotivasi untuk menghasilkan laporan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks pemerintahan Aceh, pelaksanaan forum konsultasi publik, laporan realisasi anggaran berbasis web, serta kanal pengaduan masyarakat menjadi bukti implementasi nyata akuntabilitas sosial yang berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan.

### **Pengaruh Kualitas Bimbingan Teknis terhadap Kualitas Pelaporan**

Hasil pengujian terakhir menunjukkan bahwa Kualitas Bimbingan Teknis memiliki pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap Kualitas Pelaporan, dengan nilai path coefficient 0,336, t-statistics 4,184, dan p-value 0,000. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu pelaksanaan bimbingan teknis berdampak langsung terhadap keandalan, ketepatan, dan keterpahaman laporan keuangan pemerintah.

Penelitian ini sejalan dengan Muda dan Riantani (2023) yang menyatakan bahwa efektivitas bimtek berkontribusi pada peningkatan kemampuan teknis dan pemahaman akuntansi aparatur, yang pada akhirnya memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kurniawan et al. (2024) juga menegaskan bahwa keberhasilan bimtek sangat bergantung pada kesesuaian materi dengan kebutuhan organisasi serta tindak

lanjut dalam bentuk supervisi dan evaluasi pasca pelatihan. Dengan demikian, hasil ini menegaskan bahwa pelatihan yang baik bukan hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga memperkuat perilaku tata kelola dan akuntabilitas sosial sebagai landasan moral dalam penyusunan laporan yang berkualitas.

Selanjutnya dilakukan pengujian efek mediating variabel efektivitas pengendalian internal pada pengaruh transformasi digital dan budaya organisasi terhadap perilaku tata kelola sebagai berikut

**Tabel 4. Hasil Pengujian Bootsrapping**

Pengujian	Original Sample	Standar Deviasi	T-statistics	P-values
Kualitas Bimbingan Teknis - > Perilaku Tata Kelola -> Kualitas Pelaporan	0,217	0,080	2,701	0,007
Perilaku Tata Kelola -> Akuntabilitas Sosial -> Kualitas Pelaporan	0,222	0,053	4,157	0,000

*Sumber: Output SmartPLS 3.0, 2025*

#### **Pengaruh Tidak Langsung Kualitas Bimbingan Teknis terhadap Kualitas Pelaporan melalui Perilaku Tata Kelola**

Berdasarkan hasil pengujian bootstrapping pada Tabel 5, diperoleh nilai path coefficient sebesar 0,217, dengan t-statistics 2,701 dan p-value 0,007. Hasil ini menunjukkan bahwa Perilaku Tata Kelola berperan sebagai variabel mediasi parsial yang signifikan dalam hubungan antara Kualitas Bimbingan Teknis dan Kualitas Pelaporan.

Artinya, pengaruh Kualitas Bimbingan Teknis terhadap peningkatan Kualitas Pelaporan tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung melalui perubahan perilaku tata kelola aparatur. Bimbingan teknis yang baik membantu pegawai memahami prosedur pelaporan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta menanamkan nilai-nilai integritas dan tanggung jawab publik.

Penelitian oleh Kim dan Lee (2022) serta Hassan dan Harun (2024) mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa perilaku tata kelola yang berorientasi etika dan transparansi berperan penting dalam meningkatkan kredibilitas laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, pelaksanaan bimtek yang efektif bukan hanya mengasah keterampilan teknis, tetapi juga membentuk budaya kerja yang akuntabel, terbuka, dan selaras dengan prinsip good governance.

Dalam konteks pemerintahan Aceh, temuan ini menegaskan bahwa pegawai yang telah mengikuti bimtek secara berkesinambungan cenderung lebih konsisten dalam menerapkan sistem pelaporan berbasis data dan prosedural. Hal ini mendorong terciptanya laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat dipercaya oleh publik serta lembaga pengawas eksternal seperti BPK.

### **Pengaruh Tidak Langsung Kualitas Bimbingan Teknis terhadap Kualitas Pelaporan melalui Akuntabilitas Sosial**

Hasil pengujian pada jalur Kualitas Bimbingan Teknis → Akuntabilitas Sosial → Kualitas Pelaporan menunjukkan nilai path coefficient sebesar 0,222, dengan t-statistics 4,157 dan p-value 0,000, yang berarti signifikan pada tingkat kepercayaan 99%. Temuan ini membuktikan bahwa Akuntabilitas Sosial juga berfungsi sebagai variabel mediasi signifikan dalam hubungan antara Kualitas Bimbingan Teknis dan Kualitas Pelaporan.

Artinya, bimbingan teknis yang efektif tidak hanya meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya keterbukaan dan partisipasi publik. Aparatur yang memperoleh pelatihan yang baik akan lebih mampu mengomunikasikan hasil kerja mereka kepada masyarakat, serta terbuka terhadap evaluasi dan masukan publik dalam penyusunan laporan keuangan.

Ackerman (2023) dan Fox (2015) menegaskan bahwa akuntabilitas sosial merupakan elemen penting dalam memastikan kualitas pelaporan publik karena menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan memperkecil risiko penyimpangan. Ketika pegawai memahami bahwa laporan keuangan mereka akan dinilai oleh masyarakat dan lembaga pengawas, maka mereka akan lebih berhati-hati dan akurat dalam penyusunan laporan.

Dalam konteks pemerintah daerah Aceh, hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program bimtek yang terintegrasi dengan prinsip partisipatif misalnya melalui publikasi hasil pelatihan dan forum komunikasi dengan masyarakat dapat memperkuat akuntabilitas sosial dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, Akuntabilitas Sosial terbukti menjadi mekanisme penghubung yang efektif antara peningkatan kapasitas aparatur dan kualitas pelaporan publik.

### **Penutup**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kualitas Bimbingan Teknis (Bimtek) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Pemerintah, baik secara langsung maupun

tidak langsung melalui Perilaku Tata Kelola dan Akuntabilitas Sosial sebagai variabel mediasi.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan bimbingan teknis yang berkualitas tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis aparatur, tetapi juga membentuk perilaku kerja yang transparan, disiplin, dan berorientasi pada akuntabilitas publik. Aparatur yang memahami prinsip-prinsip good governance melalui pelatihan yang efektif lebih mampu menghasilkan laporan keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya.

Selain itu, penelitian ini membuktikan bahwa Perilaku Tata Kelola dan Akuntabilitas Sosial memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan antara peningkatan kapasitas aparatur dan kualitas pelaporan. Perilaku tata kelola yang baik mencerminkan penerapan nilai integritas dan tanggung jawab individu dalam penyusunan laporan, sedangkan akuntabilitas sosial menegaskan peran partisipasi publik dan keterbukaan informasi dalam menjaga transparansi pelaporan pemerintah. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelaporan publik tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis aparatur, tetapi juga pada pembentukan perilaku etis dan kolaboratif yang didukung oleh sistem akuntabilitas sosial yang kuat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengonfirmasi pentingnya sinergi antara kapasitas teknis, perilaku tata kelola, dan akuntabilitas sosial dalam menciptakan sistem pelaporan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Temuan ini memperluas penerapan teori Good Governance dan Agency Theory dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh, yang masih menghadapi tantangan dalam peningkatan kompetensi aparatur dan partisipasi publik dalam pengawasan pelaporan keuangan.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar Pemerintah Daerah Aceh memperkuat program bimbingan teknis secara berkelanjutan dengan pendekatan berbasis kebutuhan (needs-based training) agar pelatihan yang diberikan benar-benar relevan dengan tantangan operasional di lapangan. Bimbingan teknis yang efektif tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga harus menanamkan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas kepada aparatur pemerintah. Oleh karena itu, pelaksanaan bimtek sebaiknya melibatkan narasumber berpengalaman, menggunakan metode pelatihan interaktif, serta dilengkapi dengan evaluasi hasil pelatihan untuk memastikan peningkatan kompetensi yang berkelanjutan. Selain itu, perilaku tata kelola perlu diperkuat melalui internalisasi nilai-nilai good governance seperti transparansi, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan etika publik, pembentukan kode etik yang lebih aplikatif, serta

penerapan sistem penghargaan dan sanksi yang adil sehingga mampu menumbuhkan budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan integritas.

Selanjutnya, peningkatan akuntabilitas sosial juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah perlu membuka akses informasi publik yang lebih luas melalui portal daring, laporan kinerja berbasis digital, serta forum komunikasi yang memungkinkan masyarakat turut berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan program dan pelaporan keuangan. Keterlibatan masyarakat, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat dalam proses evaluasi kinerja akan memperkuat budaya transparansi dan memperkecil potensi penyimpangan. Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam merancang strategi penguatan tata kelola pelaporan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika sosial. Ke depan, penelitian lanjutan diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah dan menambahkan variabel lain seperti digital capability atau organizational learning agar dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pelaporan pemerintah di Indonesia.

### Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta kontribusi selama proses penelitian ini berlangsung. Ucapan terima kasih secara khusus ditujukan kepada pemerintah daerah di Provinsi Aceh, terutama kepada para pejabat dan pegawai instansi pemerintah yang telah bersedia menjadi responden dan menyediakan data serta informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para pembimbing akademik dan rekan sejawat yang telah memberikan masukan berharga dalam penyusunan konsep penelitian, pengolahan data, serta penulisan naskah akhir ini. Dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak menjadi faktor penting dalam terselesaikannya penelitian ini dengan baik.

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat nyata bagi instansi pemerintah di Aceh dan daerah lainnya, khususnya dalam peningkatan kualitas pelaporan publik melalui penguatan bimbingan teknis, perilaku tata kelola, dan akuntabilitas sosial. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan inspirasi bagi upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang efektif.

### Daftar Pustaka

- Ackerman, J. M. (2023). Social accountability in the digital era: The role of public participation and transparency in government performance. *World Development*, 172, 106091. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106091>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2024). Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta: BPKP.
- Chen, Y., Li, Y., & Lee, J. (2023). Governance behavior and public accountability: Evidence from local government financial management. *Public Money & Management*, 43(5), 315–328. <https://doi.org/10.1080/09540962.2023.2178764>
- Diamond, J. (2023). Public financial management reform: Strengthening governance and fiscal transparency in developing countries. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 35(2), 150–172. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-02-2023-0024>
- Fang, Q. (2023). Governance effects of digital transformation in the public sector. *Accounting and Business Research*, 53(8), 1034–1056. <https://doi.org/10.1080/21697213.2023.2148944>
- Fox, J. (2015). Social accountability: What does the evidence really say? *World Development*, 72, 346–361. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.03.011>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2021). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). Sage Publications.
- Hassan, M., & Harun, H. (2024). Public sector reporting quality and accountability: The moderating role of governance culture. *International Journal of Public Sector Management*, 37(3), 410–432. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-06-2023-0164>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kim, S., & Lee, H. (2022). Governance behavior and accountability in public organizations: The role of ethical leadership and culture. *Public Integrity*, 24(3), 276–292. <https://doi.org/10.1080/10999922.2022.2020987>
- Kurniawan, D., Riantani, S., & Muda, I. (2024). Enhancing the quality of financial reporting through technical training effectiveness in Indonesian local governments. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2337865. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337865>
- Muda, I., & Riantani, S. (2023). The role of technical guidance in improving the performance and accountability of public financial reporting. *Asian Journal of Accounting Research*, 8(3), 234–249. <https://doi.org/10.1108/AJAR-02-2023-0012>



- OECD. (2022). OECD Principles of Good Governance in the Public Sector. Paris: OECD Publishing.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tadesse, H., & Debela, T. (2024). Organizational culture and social accountability in public financial reporting. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2340129. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2340129>

### Biografi Singkat Penulis



Tia Desi Yanti, S. STP, MM, lahir di meulaboh pada 24 desember 1985. Beliau adalah seorang PNS profesional di bidangnya.

Saat ini, beliau sedang melanjutkan pendidikan jenjang Doktoral pada Program Studi Doktor Ilmu Manajemen. Sebelumnya, beliau telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Sains Terapan Ilmu Pemerintahan pada tahun 2009 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan kemudian melanjutkan ke jenjang Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Syiah Kuala yang diselesaikan pada tahun 2019.

Sejak tahun 2009 sampai 2025, Tia Desi Yanti telah mengabdikan dirinya sebagai Aparatur Sipil Negara di Provinsi Aceh.